

PENGEMBANGAN RESILIENSI MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ACEH AKIBAT BENCANA TSUNAMI

Effy Wardati Maryam

Email : fy_wardati@yahoo.co.id

Fakultas Psikologi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak

Bencana Tsunami mengakibatkan masyarakat Aceh kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, bahkan keluarga. Salah satu dampak bencana tsunami pada perempuan adalah kehilangan pasangan hidup, sehingga membuat perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan lebih menderita akibat bencana, antara lain kehilangan keluarga dan pasangan sehingga harus berjuang keras untuk mempertahankan hidup, kehilangan harta benda, dan mengalami luka fisik (Strobe & Hanson, 1993). Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi secara positif meskipun berada dalam kesulitan yang signifikan (Rudkin, 2003). Resiliensi mencakup dua komponen, yaitu pengalaman dalam kesulitan atau stres, dan kesehatan yang mendukung. Pemberdayaan perempuan (*women's empowerment*) merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan resiliensi dalam masyarakat (Nirooja, Dilanthi & Richard, 2008). Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan sebuah proses atau mekanisme dimana sekelompok orang, organisasi atau masyarakat memiliki penguasaan atas masalah yang dialami (Rappaport dalam Rudkin, 2003). Beberapa bentuk kegiatan yang bisa dilakukan melalui pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan atau mengembangkan resiliensi akibat bencana Tsunami di Aceh yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan psikologis, dan pembentukan kelompok dukungan (*support group*). Secara ringkas, artikel ini menggambarkan peranan pemberdayaan perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan atau mengembangkan resiliensi pada masyarakat (khususnya perempuan) akibat bencana Tsunami di Aceh.

Kata Kunci : Resiliensi, Pemberdayaan Perempuan

Pendahuluan

Bencana tsunami yang terjadi di Aceh sepuluh tahun yang lalu, merupakan salah satu bencana alam terburuk di Indonesia. Bencana ini menewaskan lebih dari seratus ribu orang, selebihnya harus kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Keadaan ini memicu terjadinya kemiskinan pada masyarakat. Keadaan kemiskinan ini akan mempengaruhi kualitas hidup atau kesejahteraan hidup masyarakat (*well-being*).

Kondisi yang ditimbulkan karena bencana tsunami tersebut tidak luput mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi kaum perempuan, antara lain kehilangan suami sebagai tulang punggung keluarga, kehilangan keluarga, kehilangan

harta benda, menderita luka fisik. Bagi perempuan yang memiliki tugas ganda, yaitu membantu suami mengurus rumah tangga, membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja, dan mendidik anak-anaknya, harus berjuang keras untuk mempertahankan hidupnya sendiri dan anak-anaknya. Dampak bencana secara psikologis dan sosio-ekonomi melanda perempuan dalam jangka panjang atau relatif lama setelah bencana terjadi. Kondisi ini rentan menimbulkan kemiskinan pada kaum perempuan.

Kondisi kemiskinan tersebut memunculkan permasalahan yang sangat serius pada perempuan. Perempuan merupakan sosok penting dalam menentukan kualitas hidup keluarga dan sebagai bagian dari komunitas masyarakat. Perempuan memiliki peran dan fungsi yang strategis. Namun, peranan itu masih sulit diwujudkan karena kemiskinan. Kelompok perempuan merupakan kelompok yang paling menderita sebagai akibat dari kemiskinan, terutama jika terjadi kerawanan pangan. Ibu-ibu hamil bisa kekurangan gizi sehingga melahirkan balita yang buruk kondisi kesehatan dan mentalnya (Maryam, 2011). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulia, Schmidt, Bond, Jacobs, dan Korcha (2008) diketahui bahwa kemiskinan yang melanda perempuan bisa menyebabkan stress. Perempuan yang mengalami kemiskinan sering merasa kurang bahagia (*less happiness*) dan bahkan mengalami gangguan mental yang serius, seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan kepribadian, sebagai akibat tekanan ekonomi atau menanggung beban hidup yang berat.

Berkaitan dengan keadaan yang ditimbulkan pasca bencana tsunami seperti yang sudah digambarkan di atas, diperlukan kemampuan pada perempuan untuk bangkit kembali dari keadaan terpuruk pasca bencana tsunami, sehingga bisa hidup kembali seperti semula setelah mengalami keterpurukan. Perempuan harus belajar dan mencari elemen positif dari lingkungannya untuk membantu kesuksesan dalam proses beradaptasi dengan segala keadaan dan mengembangkan seluruh kemampuannya, meskipun mereka berada dalam kondisi hidup tertekan, baik secara eksternal maupun internal. Kemampuan untuk bangkit kembali ini disebut sebagai resiliensi, yaitu kemampuan untuk melanjutkan hidup setelah ditimpa kemalangan atau setelah mengalami tekanan yang berat. Pengembangan resiliensi pada individu dipengaruhi oleh faktor resiko (*risk factors*) dan faktor pelindung (*protective factors*) sebagai adaptasi secara individual dan lingkungan. Salah satu faktor protektif berupa sistem

pendukung di luar keluarga bisa dilakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan resiliensi pada perempuan yaitu melalui kegiatan pemberdayaan (*empowerment*).

Resiliensi

Resiliensi merupakan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dan luwes ketika menghadapi berbagai tekanan, baik internal maupun eksternal. Resiliensi merupakan kemampuan untuk melenting, kemudian memperoleh kembali tempat dan bentuknya setelah melalui tekanan yang luar biasa (Suyasa dan Wijaya, 2006). Menurut Reivich dan Shatte (dalam Riza dan Herdiana, 2013), resiliensi merupakan kemampuan individu untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, berhadapan dengan kesengsaraan (*adversity*) atau trauma yang dialami dalam kehidupan.

Rudkin (2003) membagi faktor pendorong terbentuknya resiliensi menjadi dua faktor, yaitu faktor protektif yang merupakan faktor pendukung terbentuknya resiliensi pada individu dan faktor resiko yang merupakan faktor penghambat terwujudnya resiliensi. Kedua faktor tersebut meliputi:

- a. Disposisi individu atau karakteristik menetap dalam diri individu, seperti:
 1. Kekuatan atau kesehatan fisik
 2. Temperamen *easy going*
 3. Berfungsinya inteligensi dengan baik
 4. Kemampuan berkomunikasi
 5. Kepercayaan diri
 6. Keyakinan
- b. Kualitas keluarga (*microsystem*), seperti:
 1. Hubungan yang erat (*closed relationship*) dengan sedikitnya satu *caretaker* yang kompeten, seperti orangtua, kakek-nenek, dan saudara kandung.
 2. Karakteristik pola asuh, seperti adanya kehangatan, struktur, dan harapan yang tinggi dari orangtua.
- c. Sistem dukungan lingkungan di luar keluarga (*macrosystem*), seperti sekolah, kelompok, tempat peribadatan, tetangga, dan komunitas yang memberikan penguatan pada keahlian yang dimiliki individu.

Pemberdayaan Perempuan (*women empowerment*)

Pemberdayaan yang dimaksud dalam artikel ini adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan. Konsep pemberdayaan menekankan pada kekuatan individu, yang dibentuk melalui upaya penguatan kompetensi individu (Rappaport dalam Rudkin, 2003). Pemberdayaan (*empowerment*) dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perubahan sosial (Zimmerman, 2000 dalam Rudkin, 2003). Menurut Rappaport (dalam Rudkin, 2003), perubahan sosial tersebut tidak semata-mata dilakukan atau digerakkan oleh lembaga yang berwenang (lembaga profesional), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh anggota dalam sebuah komunitas.

Rappaport menjelaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) adalah suatu proses yang sedang dan terus berlangsung secara sengaja, berpusat pada masyarakat lokal yang berpikiran kritis, memiliki prinsip saling menghormati, kepedulian terhadap sesama dan partisipasi kelompok, dimana melalui proses ini individu-individu yang tidak memiliki akses akan keadilan alokasi sumber daya, memiliki akses dan kendali akan sumber daya tersebut. Lebih lanjut Rappaport menegaskan bahwa pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau mekanisme dimana sekelompok orang, organisasi atau masyarakat memiliki penguasaan atas masalah yang dialami. *Empowerment* berkaitan antara kesejahteraan individu dengan lingkungan sosial yang lebih besar dan proses politik (Kroecker, 1995 dalam Rudkin, 2003).

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kegiatan dalam kerangka pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang memungkinkan menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan di suatu lingkungannya (Priyono dan Pranaka, 1996). Menurut Magar (2003), pemberdayaan perempuan adalah hasil dari proses dimana perilaku dan kapasitas individu dikombinasikan dengan aksi dan didukung dengan sumber-sumber yang ada sehingga tercapai tujuan. Pemberdayaan perempuan adalah proses dimana perempuan memperoleh kemampuan untuk membuat strategis pilihan hidup dalam bentuk tiga dimensi (sumber, agen atau proses, hasil atau pencapaian). Menurut Bainar dan Halik (1999), salah satu tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah menjadikan wanita mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis.

Zimmerman (dalam Rudkin, 2003) mengidentifikasi tiga komponen kunci dalam pemberdayaan (termasuk pemberdayaan perempuan), sebagai berikut :

- a. Upaya untuk memiliki akses terhadap sumber daya (*resources*). Sumber daya ini tersedia untuk kepuasan kebutuhan dan keinginan individu. Berikut penggolongan tipe-tipe *resources* menurut Hobfoll, 1988 (dalam Rudkin, 2003) :

Tipe <i>resources</i>	Level Individual	Level Kelompok atau Komunitas
Obyek	Rumah, pakaian	Jalan, peralatan darurat
Keadaan	Keamanan kerja, kesehatan yang baik	Lapangan pekerjaan, layanan darurat (<i>emergency services</i>)
Karakteristik individu	<i>Self-esteem</i> , ketrampilan kerja	<i>Sense of community</i> , <i>community competence</i>
Energi (untuk memperoleh dan melindungi <i>resources</i>)	Makanan, uang	<i>Government financing</i> , <i>fuel reserves</i>

- b. Partisipasi antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Kemampuan individu-individu untuk mengakses secara merata sumber-sumber daya dalam komunitas dan untuk melakukan suatu perubahan ditawarkan secara bersama-sama oleh masyarakat.
- c. Pemahaman yang kritis terhadap konteks sosiopolitik. Ketika individu-individu berkumpul, maka mereka akan menyadari kekuatan yang mereka miliki. Mereka bersama-sama mengidentifikasi permasalahan dan bertanggung jawab untuk melakukan perubahan (Gutierrez, 1994 dalam Rudkin, 2003). Individu-individu yang berada dalam sebuah komunitas harus memiliki kekuatan terhadap *a sense of political efficacy*, memiliki kesadaran terhadap adanya hambatan untuk perubahan dan memiliki kemampuan untuk melakukan lobi-lobi.

Menurut Riza dan Roesmidi (2006), pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

- a. Upaya itu harus terarah.
Hal inilah yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

- b. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak serta mengenali kemampuan dan kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

- c. Menggunakan pendekatan kelompok

Apabila dilakukan secara sendiri-sendiri, masyarakat sulit untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu, lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Zimmerman (dalam Rudkin, 2003) memperkenalkan tiga tingkatan analisis dalam pemberdayaan secara umum, meliputi :

- a. Tingkatan individual.

Pemberdayaan individu menekankan pada masing-masing individu. Zimmerman menyebutnya dengan istilah pemberdayaan psikologis (*psychological empowerment*). Pemberdayaan dilihat sebagai sebuah karakter atau pembawaan individu (*individual trait*). Pemberdayaan psikologis mempertimbangkan interaksi antara individu dengan lingkungan.

Pemberdayaan psikologis mencakup 3 aspek, yaitu aspek intrapersonal, interaksional, dan perilaku (*behavioral*). Aspek intrapersonal meliputi *self-esteem*, *sense of control*, *self-efficacy* (dalam konteks lingkup sosial yang lebih luas disamakan dengan *collective efficacy* atau *political efficacy*), dan *learned hopefulness*.

Aspek kedua yakni interaksional menekankan pada bagaimana individu memahami dan mencoba untuk mempengaruhi lingkungan sosialnya. Pada aspek ini membutuhkan 2 ketrampilan utama, yaitu ketrampilan internal kelompok yang menekankan pada keharusan anggota kelompok untuk berfungsi secara efektif pada kelompoknya (seperti partisipasi yang membawa individu bekerja dalam koalisi,

inisiatif untuk pengembangan komunitas, kerjasama dalam kelompok), dan ketrampilan eksternal kelompok yang menekankan pada kemampuan individu dalam melakukan perubahan dengan mengontrol atau mengembangkan sumber daya yang ada.

Aspek ketiga adalah perilaku (*behavioral*), yaitu melakukan tindakan untuk mengakses dan mengontrol sumber daya. Pada konsep pemberdayaan, aspek ini lebih dikenal dengan istilah partisipasi masyarakat (*citizen participation*), yaitu sebuah proses dimana individu berperan serta dalam pengambilan keputusan dalam kelembagaan, program, dan lingkungan yang mempengaruhi mereka (Heller, dkk, 1984, dalam Rudkin, 2003). Partisipasi masyarakat merupakan sarana untuk pengembangan kualitas kehidupan individu, sehingga meningkatkan perasaan individu akan kemampuannya dalam mengendalikan kehidupan.

b. Tingkatan mikrosistem.

Tingkatan ini mendorong usaha pemberdayaan melalui hubungan antara individu dengan sistem yang lebih tinggi atau luas. Peter Berger dan Richard Neuhaus (dalam Rudkin, 2003) mengidentifikasi 4 mikrosistem, yaitu keluarga, gereja, asosiasi relawan, dan lingkungan tempat tinggal. Berkowitz dan Wolff, 1996 (dalam Rudkin, 2003) menggambarkan beberapa prinsip untuk menciptakan dan mendukung pemberdayaan, yaitu membangkitkan keyakinan yang bisa menstimulasi adanya *strengths*, peluang untuk terlibat (berperan serta), kepemimpinan, struktur organisasi, inovasi, dan *sense of group identity*.

c. Tingkatan di luar mikrosistem (makrosistem).

Pemberdayaan menghubungkan antara individu dengan lingkungan lokal dan struktur sosial yang lebih besar (Chavis, dkk, dalam Rudkin, 2003). Tingkatan makrosistem ini memberikan kesempatan pada individu untuk bergabung dengan kelompok dimana mereka bisa membangun kompetensi baru, percaya diri, menumbuhkan *sense of control*, mengurangi perasaan keterasingan sosial, dan optimis terhadap masa depan. Individu yang bekerja secara koalisi bisa lebih mengembangkan lingkungannya. Individu bersama-sama lembaga pemberdayaan juga melakukan perubahan dalam struktur yang lebih luas.

Pemberdayaan Perempuan Untuk Mengembangkan Resiliensi Pasca Bencana Tsunami

Berdasarkan konsep pemberdayaan perempuan yang dipaparkan penulis di atas, ada tiga bentuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan resiliensi pada kaum perempuan di Aceh pasca bencana tsunami, yaitu :

a. Pemberdayaan ekonomi

Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar perempuan bisa mandiri di bidang ekonomi yaitu melalui kegiatan pelatihan ketrampilan (Maryam, 2011). Tujuan diadakannya pelatihan ketrampilan ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan perempuan sehingga bisa mengelola kegiatan usaha yang produktif. Pada akhirnya perempuan bisa mengatasi persoalan ekonomi akibat bencana tsunami. Perlu diperhatikan terkait pelatihan ketrampilan ini yaitu keterlibatan atau partisipasi perempuan secara aktif dalam bentuk aksi bersama (*group action*) untuk menentukan jenis pelatihan ketrampilan yang memang dibutuhkan oleh mereka, sehingga sesuai dengan potensinya.

Menurut Riza dan Roesmidi (2006), konsep pemberdayaan dengan mengikutsertakan masyarakat mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak, serta mengenali kemampuan dan kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Pola pemberdayaan masyarakat (termasuk di dalamnya perempuan) bukan merupakan kegiatan yang sifatnya *top-down intervention* yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya, karena yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah adalah pola pemberdayaan yang sifatnya *bottom-up intervention* yang menghargai dan mengakui bahwa mereka memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan (Zamhariri, 2008).

b. Pemberdayaan psikologis

Pemberdayaan psikologis menekankan pada upaya penguatan pada masyarakat (termasuk perempuan) terkait *self-efficacy*, *self-esteem*, *self of control*,

dan *hopefulness* (Zimmerman dalam Rudkin, 2003). Memiliki harga diri dan keyakinan akan kemampuan melakukan sesuatu, diharapkan perempuan akan menjadi tahan banting dan bangkit kembali ketika mereka menghadapi situasi yang sulit dan berat (Ortigas, 2000 dalam Markum, 2009), seperti ketika mereka menjadi korban bencana tsunami. Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan di sini yaitu melalui psikoedukasi. Psikoedukasi adalah pemberian informasi dan pendidikan psikologis yang sederhana pada masyarakat luas, yang bertujuan untuk membantu masyarakat (termasuk perempuan) memahami aspek-aspek psikososial dari masalah yang mereka hadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemulihan (Poerwandari, 2003).

c. Pembentukan kelompok dukungan atau kerjasama dalam kelompok (*support groups*)

Kelompok dukungan merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang mengalami kejadian serupa (Poerwandari, 2003). Pembentukan kelompok dukungan ini bisa menumbuhkan *self efficacy* anggota, karena melalui dukungan dari anggota dalam kelompok akan lebih mudah untuk yakin dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, melalui pembentukan kelompok dukungan ini, memungkinkan anggota untuk membentuk jaringan kerja dari anggota lain, berbagi pengalaman dalam kegiatan usaha produktif (Maryam, 2011).

Poerwandari (2003) mengemukakan tiga tujuan utama pembentukan kelompok dukungan, yaitu : (1). penyediaan sarana berbagi perasaan, yang pada gilirannya akan menurunkan beban dan ketegangan, sekaligus menyadarkan anggota kelompok bahwa ada orang-orang lain yang juga mengalami hal serupa, (2) penyediaan sarana saling menguatkan, yang kadang lebih efektif dilakukan oleh sesama, daripada oleh professional kesehatan mental, (3) penyediaan sarana diskusi untuk saling bertukar pemikiran, saling bertukar dan menguatkan harapan, ataupun strategi menghadapi kesulitan, dan bahkan dapat terjadi perkembangnya aktivitas-aktivitas kelompok lanjutan sebagai kesepakatan bersama, seperti membentuk usaha bersama.

Kesimpulan

Dampak bencana tsunami membawa pengaruh besar pada kaum perempuan sebagai kelompok masyarakat yang rentan, karena harus kehilangan suami dan beralih peran sebagai kepala rumah tangga. Diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan mereka agar bisa bangkit kembali dari kondisi keterpurukan (resiliensi), yaitu melalui kegiatan pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) yang mampu meningkatkan potensi atau kapasitas perempuan dalam menghadapi kehidupan pasca bencana. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan perempuan adalah pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan psikologis, dan pembentukan kelompok dukungan (*support groups*).

Daftar Pustaka

- Bainar dan Halik, A. 1999. *Jagat Wanita : Dalam Pandangan Para Tokoh Dunia*. Jakarta : PT. PusakaCidesindo.
- Magar, V. 2003. Empowerment Approaches to Gender-Based Violence: Women's Courts in Delhi Slums. *Women's Studies International Forum*, volume 26, issue 6. Diakses pada tanggal 20 Nopember 2014 dari http://scholar.google.com/scholar?q=empowerment+approaches+to+gender-based&hl=id&as_sdt=0,5
- Maryam, Effy Wardati. 2011. *Pengembangan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program P3EL di Kabupaten Sidoarjo*. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya : Fakultas Psikologi UNAIR.
- Mulia, N., dan Schmidt, L., dan Bond, J., dan Jacobs, L., dan Korcha, R. 2008. Stress, social support and problem drinking among women in poverty. *Journal Compilation Society for the study of addiction Vol. 103*. Diakses pada tanggal 19 Nopember 2014 dari http://scholar.google.com/scholar?q=stress%2C+social+support+and+problem+drinking&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C5.
- Poerwandari, K.E. 2003. *Pemulihan Psikososial Berbasis Komunitas*. Jakarta: Yayasan Pulih.
- Prijono, O. dan Pranaka. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta:CSIS.
- Riza dan Herdiana. 2013. Resiliensi Pada Narapidana Laki-laki Di Lapas Klas 1 Medaeng. *Jurnal Psikologi UNAIR* (on-line). Diakses pada tanggal 19 Nopember 2014 dari http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Muhammad%20Riza%20%28110810248%29_Ringkasan%20fix.pdf
- Riza, R. dan Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : Alqaprint Jatinangor.
- Rudkin, J.K. 2003. *Community Psychology (Guiding Principles and Orienting Concepts)*. USA:Prentice Hall.
- Suyasa dan Wijaya. 2006. Resiliensi dan Sikap terhadap Penyalahgunaan Zat. *Jurnal Psikologi Universitas Tarumanegara* (on-line). Diakses pada tanggal 19 Nopember 2014.

